

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis di atas, maka secara garis besar dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan SILPA pada APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2013-2017 berfluktuasi. Dimana SILPA pada periode 2013 ke 2014 mengalami peningkatan sebesar 9 %. Sementara SILPA dari tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan sebesar 36%. SILPA dari tahun 2015 ke 2016 naik sebesar 78 %, sedangkan SILPA dari tahun 2016 ke 2017 menurun sebesar 3%.
2. Faktor-faktor penyebab timbulnya SILPA pada APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2013-2017 menunjukkan bahwa adalah :
 - a. Pelampauan pendapatan daerah yang ditunjukan oleh data yang diperoleh peneliti bahwa realisasi pendapatan daerah selalu lebih besar jumlahnya daripada yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Pendapatan daerah yang paling potensial bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi.
 - b. Penghematan belanja daerah yang ditunjukan dari data yang diperoleh peneliti bahwa realisasi belanja daerah selalu lebih kecil daripada yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Penghematan belanja

merupakan sumber terbesar penyebab SILPA di setiap tahun anggaran, khususnya belanja pegawai tahun anggaran 2013-2017.

c. Sisa dana kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT yang belum selesai bahkan belum sama sekali dilaksanakan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penyebab timbulnya SILPA.

3. Analisis SILPA pada APBD Pemerintah Provinsi NTT pada tahun anggaran 2013-2017 menunjukkan bahwa jumlah SILPA yang terus berubah setiap tahunnya.

6.2. Saran

1. Di dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi NTT perlu melakukan perencanaan dengan lebih cermat, seperti menetapkan target pendapatan daerah yang lebih tinggi berdasarkan potensi yang dapat dicapai, serta merencanakan belanja sebaik mungkin sehingga dapat terserap dengan baik.
2. Pemerintah Provinsi NTT perlu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan khususnya dalam menganggarkan, melaksanakan dan mewujudkan program dan kegiatan yang telah dianggarkan agar dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya secara langsung maupun tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Aprizay, Darwanis. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*
- Iman Suharna. 2015. *(SiLPA) Pada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2013*.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- , 2011. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta, Andi
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 tentang *Laporan Realisasi Anggaran*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Setiyani. 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten Karesidenan Pati Periode 2009-2013)*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *SILPA dan Hak Masyarakat*.